

MEMAKNAI MERDEKA BELAJAR

(Studi Literatur Kurikulum Merdeka Belajar)

Susanti Sufyadi¹

¹Program Studi Teknologi Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

susanti.sufyadi@ulm.ac.id

Abstract

The merdeka belajar policy is the first series launched by the Minister of Education, Culture, Research, and Technology of Indonesian and includes four points, namely: transferring the implementation of USBN to the authority of the education unit, eliminating the national examination in 2021, simplifying the learning lesson which focuses on three components including goals learning, learning activities, assessment, and the proportion of achievement paths to the acceptance of new students in the zoning system. This policy was then followed by another series of merdeka belajar policies, the most related to the first series being the merdeka belajar policy series seven and eight, namely: the activator school program and the center for vocational high school program of excellence. Until now the implementation of the merdeka belajar policy is still a topic that is widely discussed, as part of the education ecosystem we cannot just wait and be observers, contributions can be made from now onwards to support the implementation of this policy. The contents of this article do not directly discuss the points in the merdeka belajar policy, but rather lead to rational explanations to build an understanding of the meaning and urgency of merdeka belajar and the interrelationships of the merdek belajar series of policies in general. The discussion is carried out referring to the literature review and analysis of the evaluation results of the implementation 2013 curriculum which was carried out at the curriculum and learning center in 2019. Through this article, the author hopes to be able to share thoughts about the meaning of merdeka belajar so that then we can all determine the contribution that can be made to support the implementation of this policy.

Keywords: *Meaning of Merdeka Belajar, Educational Architecture, Adaptation of Learning, Evaluation of 2013 Curriculum Implementation.*

Abstrak

Kebijakan Merdeka Belajar seri pertama yang dicanangkan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan mencakup 4 (empat) poin yaitu: pengalihan pelaksanaan USBN menjadi kewenangan satuan pendidikan, penghapusan Ujian Nasional di Tahun 2021, penyederhanaan RPP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen meliputi: tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan poin ke empat yaitu penambahan proporsi jalur prestasi pada penerimaan peserta didik baru dalam sistem zonasi. Kebijakan ini kemudian di ikuti dengan seri kebijakan Merdeka Belajar lainnya, yang paling terkait dengan seri yang pertama adalah Kebijakan Merdeka Belajar seri ke-7 (tujuh) dan ke-8 (delapan), yaitu: Program Sekolah Penggerak dan Program SMK Pusat Keunggulan. Sampai saat ini implementasi kebijakan Merdeka Belajar masih menjadi topik yang ramai dibicarakan, sebagai bagian dari ekosistem pendidikan kita tidak bisa hanya menunggu dan menjadi pengamat, kontribusi dapat diberikan sejak dari sekarang dan seterusnya untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Isi dari artikel ini tidak membahas langsung poin-poin dalam kebijakan Merdeka Belajar namun lebih mengarah pada penjelasan rasional untuk membangun pemahaman akan makna dan urgensi Merdeka Belajar serta keterkaitan seri kebijakan Merdeka Belajar secara umum. Pembahasan dilakukan merujuk pada kajian literatur dan analisis hasil evaluasi implementasi Kurikulum 2013 yang dilaksanakan pada Pusat Kurikulum dan Pembelajaran di Tahun 2019. Melalui artikel ini penulis berharap dapat berbagi pemikiran tentang makna Merdeka Belajar, agar kemudian kita semua dapat menentukan kontribusi yang dapat diberikan untuk mendukung implementasi kebijakan ini.

Kata kunci: Makna Merdeka Belajar, Arsitektur Pendidikan, Penyesuaian Pembelajaran, Penilaian, Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013.

Pendahuluan

Apa yang kita alami saat ini bukan revolusi pendidikan, akan lebih baik jika dipahami sebagai pergeseran atau transisi dalam dunia pendidikan. Transisi yang didasari kesadaran kita akan pentingnya pengembangan keterampilan dan kompetensi umum khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kesadaran yang akan mengarahkan kita pada upaya untuk secara eksplisit menjadikan pencapaian kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi kebutuhan masa depan sebagai tujuan, sekaligus mempertimbangkan implikasinya pada bagaimana cara atau strategi mengajarkan dan atau mempelajarinya, bagaimana melakukan penilaian, dan bagaimana memberikan dukungan kepada guru, satuan pendidikan, peserta didik bahkan kepada orang tua atau siapapun yang terlibat untuk bisa melakukan ini semua.

Tujuan Pendidikan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain pada umumnya adalah untuk membekali peserta didik dengan kemampuan yang akan membantu mereka untuk berkontribusi di dalam masyarakat, karena masyarakat telah berubah, maka pendidikan perlu merespon. Pemahaman ini dimiliki oleh para pelaku pendidikan, namun implikasi dari perubahan ini yang selalu akan menjadi tantangan. Berangkat dari pertanyaan apa makna kemerdekaan belajar bagi pemangku kepentingan pendidikan, mengarahkan pemikiran kepada komponen-komponen pendidikan terutama yang terkait dengan pembelajaran yang meliputi peserta didik, orang tua, guru serta sistem sekolah. Dalam artikel ini untuk memahami intervensi yang dibutuhkan oleh komponen sistem sekolah penulis mengkajinya dari aspek arsitektur pendidikan yang dibahas dalam buku Clay (2008), sementara untuk peserta didik, guru dan orangtua, penulis mengkajinya dari aspek penyesuaian pembelajaran dan penilaian yang dibahas dalam buku Care (2018) dan Schunk (2012). Menyarikan / megikhtisarkan penjelasan di dalam ketiga buku referensi tersebut dikaitkan dengan hasil kajian evaluasi implementasi kurikulum 2013 yang dilaksanakan Pusat Kurikulum dan

Pembelajaran pada Tahun 2019, berikut hasil kajian referensi yang dilakukan.

Metode Penelitian

Pada artikel ini untuk memaknai merdeka belajar akan dibahas dengan mengkaitkan hasil studi literatur dan hasil evaluasi implementasi kurikulum 2013 yang dilaksanakan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran pada Tahun 2019. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji dan menyarikan pemikiran yang tertuang dalam 3 (tiga) buku referensi yaitu: 1) *Disrupting class, how disruptive innovation will change the way the world learns*, yang ditulis oleh dosen di *Harvard Business School* bernama Clayton M. Christensen (2008); 2) *Assessment and teaching of 21st century skills, research and applications* ditulis oleh Care, Griffin & Wilson (2018), dan 3) *Learning Theories an educational perspective* yang ditulis oleh Dale H. Schunk (2012). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen kajian literatur pada Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Tahun 2019 dan studi lapangan dengan teknik observasi pembelajaran dan wawancara peserta pelatihan selama penulis pernah menjadi pelatih/instruktur/narasumber sosialisasi dan bimbingan teknis implemnetasi kurikulum 2013. Teknik analisis data menggunakan triangulasi sumber data antara hasil pengumpulan data online dan kunjungan langsung ke lapangan, kesimpulan hasil kajian yang mencakup kesiapan dokumen kurikulum 2013 untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan serta monitoring pelaksanaan kurikulum 2013.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Arsitektur Satuan Pendidikan

Dalam bukunya Clay (2008) menjelaskan bahwa semua produk dan layanan memiliki arsitektur, atau desain, yang menentukan bagian-bagiannya dan bagaimana mereka harus berinteraksi satu sama lain. Tempat di mana dua bagian cocok bersama disebut antarmuka (*interface*). Antarmuka ada dalam suatu produk, antar kelompok orang atau antar departemen dalam suatu organisasi yang harus saling berinteraksi. Terdapat dua jenis desain produk atau layanan, yaitu *interdependent* dan *modular*.

Desain suatu produk saling tergantung (*interdependent*), jika cara satu komponen dirancang dan dibuat tergantung pada cara komponen lain dirancang dan dibuat. Ketika terjadi saling ketergantungan yang tidak dapat diprediksi pada antar muka antar komponen, maka dua komponen ini menjadi tidak cocok, dalam kondisi seperti ini jika ingin mengembangkan komponen yang baik maka satu unit harus mengembangkan kedua komponennya. Sebaliknya, dalam desain produk modular, ada komponen yang dibuat standar sehingga komponen lain bisa menyesuaikan, tidak ada saling ketergantungan yang tak terduga. Komponen modular (yang dibuat standar) cocok dan bekerja bersama dengan baik dan dikodifikasi dengan jelas. Arsitektur modular menentukan kesesuaian dan fungsi dari semua elemen yang sangat lengkap sehingga tidak masalah siapa yang membuat komponen atau subsistem selama mereka memenuhi spesifikasi yang ditentukan.

Untuk mengilustrasikannya, kita perhatikan bola lampu, bola lampu memiliki antarmuka antara batang bohlam dan soket bohlam, ini adalah desain modular. Insinyur memiliki kebebasan untuk mengembangkan desain bola lampu, selama mereka membuat batang bola lampu dan memastikan bahwa bola lampu dapat sesuai dengan spesifikasi soket bola lampu yang sudah ada. Perhatikan betapa mudahnya bola lampu yang baru masuk pada songket tempat bola lampu lama, baik itu bola lampu yang panjang, lampion, atau bentuk lainnya. Perusahaan yang membuat bola lampu tidak perlu membuat soket, sistem pembangkit

listrik atau memikirkan distribusi, karena ada standar antarmuka diantara semua komponen ini. Sehingga berbagai unit dapat menyediakan produk yang merupakan bagian dari sistem.

Arsitektur satuan pendidikan kita bersifat saling tergantung (*interdependent*), menurut Clay (2008) ada 4 (empat) jenis ketergantungan yang terdapat dalam arsitektur satuan pendidikan, yang pertama ketergantungan yang terkait dengan waktu (*temporal*), contoh: peserta didik tidak dapat mempelajari materi atau kompetensi dasar di kelas IX (sembilan) jika peserta didik tidak mempelajarinya di kelas VII (tujuh). Kedua ketergantungan lateral (*berpikir di luar pola*), contoh: seorang guru dalam pembelajaran tidak dapat melewati jabaran kompetensi dasar atau materi tertentu karena khawatir jika tidak mengajarkan materi tertentu materi tersebut akan muncul di dalam ujian atau jika mengubah susunan kompetensi dasar akan mempengaruhi pola penilaian. Ketiga ketergantungan fisik, contohnya: tidak semua satuan pendidikan dapat melaksanakan STEAM, model pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran non-konvensional lainnya karena satuan pendidikan kurang memiliki sarana dan prasarana. Ketergantungan ke 4 (empat) adalah ketergantungan hierarkis, contoh: kreatifitas guru yang bertentangan dengan kebijakan kepala satuan pendidikan dan pengawas, atau keinginan satuan pendidikan untuk berinovasi bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah, contoh: satuan pendidikan ingin menyusun soal sendiri untuk pelaksanaan ujian satuan pendidikan tetapi kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau bahkan Provinsi soal ujian satuan pendidikan disusun di tingkat daerah, mengubah ujian satuan pendidikan menjadi ujian berstandar daerah.

2. Penyesuaian Pembelajaran

Setiap peserta didik belajar dengan cara yang berbeda. Di dalam bukunya *Learning Theories an Educational Perspectives*, Schunk (2012) menjelaskan tentang beberapa isu pada pendidikan dan pembelajaran yang terkait dengan riset tentang otak, isu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peran pendidikan anak usia dini
- b. Kompleksitas proses kognitif
- c. Diagnosis kesulitan tertentu, dan

d. Sifat pembelajaran yang beragam

Isu yang pertama, menyiratkan pentingnya peran pendidikan anak usia dini untuk kesiapan sekolah dan belajar anak. Fakta bahwa otak anak-anak sangat padat menyiratkan bahwa lebih banyak neuron belum tentu lebih baik, kemungkinan ada keadaan fungsi otak memiliki jumlah neuron dan sinapsis yang “benar” – (tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit) dan hal ini melibatkan perkembangan fisik, emosional, dan kognitif. Proses pembentukan di otak inilah yang menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini penting. Isu kedua menyangkut gagasan bahwa instruksi dan pengalaman belajar yang harus direncanakan untuk memperhitungkan kompleksitas proses kognitif seperti perhatian dan memori. Implikasinya adalah pendidik tidak dapat berasumsi bahwa teknik instruksional tertentu akan membantu mendapatkan perhatian siswa atau membantu mereka mengingat. Sebaliknya, pendidik harus lebih spesifik tentang aspek perhatian apa yang akan menarik dari instruksi dan jenis memori tertentu yang sedang ditangani.

Isu ketiga melibatkan perbaikan kesulitan belajar siswa. Penelitian otak menyarankan bahwa kunci untuk memperbaiki kekurangan dalam mata pelajaran tertentu adalah menentukan aspek atau kompetensi apa yang menjadi kesulitan peserta didik dan kemudian secara khusus membahasnya. Hanya penilaian yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengidentifikasi kesulitan yang dapat membuat identifikasi, agar kemudian prosedur untuk mengatasi kesulitan belajar dapat diimplementasikan untuk mengatasi kebutuhan intervensi yang spesifik.

Isu terakhir menyangkut kompleksitas teori belajar, penelitian menunjukkan bahwa seiring waktu, teori belajar menjadi lebih kompleks. Teori-teori belajar terkini lebih mencerminkan realitas otak, hal ini menunjukkan bahwa pendidik harus menerima kompleksitas lingkungan belajar sekolah dan menyelidiki cara-cara di mana banyak aspek lingkungan dapat dikoordinasikan untuk meningkatkan pembelajaran siswa.

Dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwa tantangan guru untuk melakukan

penyesuaian pembelajaran memang nyata. Selain karena peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda, cara otak bekerja selama pembelajaran juga menjadi rasional yang mengarahkan pada kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda, tantangan ini merupakan tantangan yang sulit, tidak akan ada satu cara yang sama (*one size fits all*) dan bisa secara efektif diterapkan di semua satuan pendidikan atau kelas agar dapat mengakomodir kebutuhan belajar semua anak yang berbeda. Contohnya yang dialami oleh sebagian besar anak-anak kita selama mengikuti pembelajaran dari rumah semasa pandemi Covid-19, penyesuaian-penyesuaian pembelajaran yang biasanya terjadi di ruangan kelas menjadi sulit dilakukan ketika pembelajaran jarak jauh meski difasilitasi dengan teknologi, karena interaksi langsung yang memungkinkan guru bisa melihat kondisi dan kebutuhan belajar siswa yang tidak terjadi. Umumnya menerapkan strategi dan intervensi, atau memberikan tugas yang sama untuk semua peserta didik adalah cara yang dilakukan guru dengan tujuan untuk mendapat bukti hasil belajar yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian. Pertanyaannya adalah: jika ada anak yang tidak dapat mengikuti pembelajaran bukan karena dia tidak mampu tetapi karena dia tidak memahami instruksi dan strategi pembelajaran yang harus dilakukan, apakah anak ini dianggap gagal?

Ketika sebagian orang tua yang memiliki kesadaran akan kondisi yang dialami anaknya dan kemudian meminta atau menyarankan kepada para guru untuk melakukan penyesuaian pembelajaran (*differentiated learning*), meski guru menerima usulan mereka dan berkata akan berusaha melakukannya, namun sepertinya yang ingin guru katakan lebih seperti ini “saya sudah mengajar dengan cara yang saya ketahui, semua sumber daya dan usaha untuk mengatasi kendala pembelajaran di masa pandemi Covid-19 sudah saya kerahkan, dan ini berjalan dengan baik saja selama beberapa waktu ini (kegiatan pembelajaran yang dilakukan dan tugas-tugas yang terkumpul), kemudian dia menyebutkan nama-nama sebagai contoh anak-anak yang dapat belajar dengan baik, tetapi selain anak-anak tersebut ada anak-anak lain yang mungkin mengalami kesulitan pembelajaran yang belum teridentifikasi,

pertanyaan berikutnya adalah apakah pemikiran guru ini keliru?

Pertanyaan yang lebih penting dibanding dua pertanyaan diatas adalah, ketika kita semua menyadari permasalahan ini “apakah kita, peserta didik, guru, orangtua, kita semua memiliki kemampuan untuk memperbaiki kondisi ini?” Memiliki kemampuan, memiliki daya atau berdaya juang untuk melepaskan diri dari belenggu ini? Pertanyaan ini-lah yang menurut penulis dapat dijadikan dasar oleh kita untuk menyadari pentingnya kebijakan merdeka belajar, kebijakan yang kita harapkan dapat memberikan kita “keberdayaan” untuk mendukung anak-anak kita, guru-guru kita, mendukung diri kita sendiri agar berhasil dalam melakukan pembelajaran.

3. Penilaian

Penilaian meski bersifat *low stakes* terhadap peserta didik, maknanya apapun hasil dari penilaian ini tidak berkonsekuensi langsung kepada peserta didik, misalnya penilaian yang dilakukan untuk memverifikasi seberapa baik sistem pendidikan (atau sistem satuan pendidikan). maka terlepas dari berapapun nilai peserta didik, peserta didik tidak akan dinyatakan tidak naik kelas, tidak lulus, atau dimasukkan dalam kelas khusus untuk mendapatkan intervensi. Bentuk penilaian ini sekalipun tetap bisa mempengaruhi kondisi psikologis peserta didik, peserta didik tetap bisa merasa stress meski tidak sebesar stress yang dirasakan ketika dia menghadapi penilaian yang bersifat *high stake*. Upaya mengurangi stress pada peserta didik adalah melaksanakan penilaian dengan berbagai cara atau strategi, misalkan di akhir pembelajaran peserta didik diminta mengisi lembar reflektif yang isinya *insight* peserta didik terhadap pembelajaran hari itu, atau melalui observasi, penilaian selama proses pembelajaran atau melalui penugasan dalam pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran berbasis masalah. Sayangnya untuk alasan kepraktisan saat ini penilaian yang dilakukan umumnya masih menggunakan pola yang sama, umumnya tes kertas dan pensil atau berbasis komputer dan peserta didik mengetahui bahwa mereka sedang mengikuti tes atau penilaian.

Kajian implementasi kurikulum 2013 yang dilaksanakan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran pada Tahun 2019 memperlihatkan hasil analisis data sebagai berikut:

Komponen/Kategori	Rata-rata	Kriteria
Sosialisasi Kurikulum 2013	3,11	Efektif/Sesuai
Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013	3,08	Efektif/Sesuai
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013	2,97	Tidak Efektif/Tidak Sesuai
Kesesuaian Implementasi Kurikulum 2013	3,28	Efektif/Sesuai
Monitoring Implementasi Kurikulum 2013	2,98	Tidak Efektif/Tidak Sesuai

Gambar 1. Hasil Analisis Data Online Kajian Implementasi Kurikulum 2013

Dari analisis data observasi pembelajaran, wawancara, dan studi dokumen diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Observasi Pembelajaran
 - a. Sebagian guru dalam melaksanakan kegiatan pendahuluan pembelajaran sudah menggunakan tahapan yang sesuai.
 - b. Sebagian guru sudah menguatkan pendidikan karakter, literasi, dan kecakapan abad 21 (4C: *creative, critical, colaborative* dan *communicative*).
 - c. Pelaksanaan pembelajaran PBL-*discovery* dan PjBL belum sesuai.
 - d. Sebagian guru sudah menjalankan sintak sesuai model yang digunakan, walaupun masih ada sebagian kecil guru yang dalam pelaksanaan pembelajaran belum menggambarkan sintak dari model yang di pilih dan menggunakan pendekatan saintifik.
 - e. Mayoritas guru kejuruan belum menerapkan model pembelajaran TEFA dan Production Based/
 - f. Sebagian guru terkendala dalam membuat instrumen penilaian sikap.
 - g. Sebagian kecil guru mengakhiri kegiatan penutupan belum melakukan refleksi.

2. Wawancara
 - a. Rata-rata guru sudah mengikuti sosialisasi dokumen kurikulum 2013, walaupun diperoleh dari teman sendiri yang sama-sama belajar, tidak dari narasumber langsung yang berkompeten.
 - b. Dampak sosialisasi belum secara nyata menggambarkan peningkatan prestasi satuan pendidikan semenjak di implementasikan kurikulum 2013.
 - c. Pelatihan implementasi kurikulum 2013 belum menyeluruh karena narasumber yang terbatas.
 - d. Dampak hasil pelatihan belum secara signifikan merubah pemahaman dan prestasi kinerja guru dan satuan pendidikan.
 - e. Mayoritas hasil pendampingan belum berdampak secara signifikan terhadap pemahaman, kinerja, dan kualitas hasil pendidikan di satuan pendidikan.
 - f. Mayoritas pengimplementasian muatan-muatan materi pembelajaran sudah merujuk kedalam struktur kurikulum.
3. Studi Dokumen
 - a. Dokumen sudah merujuk pada Permendikbud, dan Peraturan Dirjen untuk SMK, akan tetapi masih ada sebagian guru SMK yang masih menjadikan rujukan perdirjen 330 Tahun 2017, padahal seharusnya sudah menggunakan perdirjen 464 Tahun 2018 sebagai rujukan.
 - b. Didalam Buku II, silabus masih banyak guru yang belum paham dalam menuliskan IPK dari KD Pengetahuan maupun KD keterampilan.
 - c. Dalam Buku III, masih ada sebagian guru dalam menyusun perangkat pembelajaran (RPP), belum menggunakan sintak yang sesuai dari model pembelajaran yang digunakan

Dengan melakukan triangulasi data antara hasil pengumpulan data online dan

kunjungan langsung ke lapangan, kesimpulan hasil kajian yang mencakup kesiapan dokumen kurikulum 2013 untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan serta monitoring pelaksanaan kurikulum 2013, dapat dirumuskan sebagai berikut:

Meski hasil studi dokumen mengindikasikan kesesuaian antara implementasi dan konsep kurikulum 2013, sementara hasil wawancara dan observasi teridentifikasi beberapa penyebab inefektivitas pembelajaran diantara lain:

- a. Pemahaman guru akan konsep *mastery learning* masih berfokus pada ketuntasan menyampaikan seluruh materi pembelajaran, belum berfokus pada pemahaman peserta didik (ketuntasan belajar peserta didik).
- b. Terjadi distorsi terhadap pemahaman konsep kurikulum secara utuh, pada umumnya guru lebih terkonsentrasi pada penyiapan dokumen yang bersifat administratif.
- c. Guru mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik khususnya pada penilaian karakter atau sikap.
- d. Guru mengalami kesulitan dalam kontekstualisasi pembelajaran dan sebagian besar guru menjadikan buku teks pelajaran sebagai satu-satunya bahan belajar dan sumber belajar.
- e. Pelatihan yang dilakukan meskipun sudah dilakukan dengan strategi yang sesuai, namun belum memenuhi kebutuhan kompetensi guru.
- f. Keikutsertaan guru di dalam pelatihan tidak merata (hanya beberapa orang saja yang sama).
- g. Pemerintah daerah belum banyak yang teridentifikasi dalam melakukan pelatihan terkait kurikulum 2013.

Untuk menghubungkan penjelasan 3 (tiga) tantangan transisi pendidikan yang disarikan dari buku Clay (2008), dengan analisis hasil kajian implemetasi kurikulum 2013 yang dilaksanakan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran pada Tahun 2019 dapat memberikan pemahaman yang lebih kongkrit terkait kondisi kita saat ini.

1. Arsitektur Satuan Pendidikan.

Sebagaimana dijelaskan Clay (2018) terdapat dua jenis desain dalam setiap produk atau layanan, yaitu interdependent dan modular. Clay juga menjelaskan bagaimana arsitektur satuan pendidikan memiliki desain yang interdependat, dan dari hasil kajian evaluasi implementasi kurikulum 2013 kita dapat identifikasi bahwa interdependasi ini berdampak pada pengelolaan satuan pendidikan khususnya pembelajaran. Memperhatikan data yang diperoleh dan kesimpulan yang dirumuskan, dapat kita lihat bagaimana beberapa komponen dalam sistem pendidikan atau satuan pendidikan kita yang bersifat saling bergantung memiliki antarmuka yang tidak sesuai. Meski beberapa standar telah ditetapkan, dan idelanya standar ini bersifat modular, sesuai dengan komponen lain atau menjadi perekat antar komponen, dari temuan lapangan mengindikasikan keberadaan standar ini menjadi desain interdependan sendiri yang sangat kuat pengaruhnya dan membatasi fleksibilitas serta inovasi.

Untuk lebih memahaminya, satu contoh yang menggambarkan desain interdependent yang terindikasi terlihat dalam dalam kerangka kurikulum 2013:



Gambar 2. Kerangka Kurikulum 2013

Di dalam kerangka kurikulum 2013 terdapat tiga komponen, yaitu: komponen mata pelajaran, komponen kompetensi, dan komponen konteks, ketiga komponen ini saling terkait. Mata pelajaran berfungsi sebagai alat atau sarana untuk mencapai kompetensi-kompetensi pada komponen kompetensi,

sementara komponen konteks merupakan tema-tema yang disampaikan dalam pembelajaran baik berbasis mata pelajaran dan atau berbasis tematik terpadu. Meski secara konsep ketiga komponen tersebut saling terkait, namun keterkaitan ini pada pelaksanaan pembelajaran pada banyak satuan pendidikan belum teridentifikasi. Kondisi ini disebabkan karena baik komponen kompetensi atau komponen konteks belum tersirat dalam standar isi, kompetensi inti, dan kompetensi dasar (KD) yang ditetapkan, pada akhirnya pembelajaran belum dapat mencapai kompetensi pada komponen kompetensi dan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan konteks yang dijabarkan dalam komponen konteks.

Setelah kita menganalisis hal ini, dapat kita pahami mengapa program gerakan literasi sekolah dan program penguatan karakter muncul. Meski di dalam kerangka kurikulum 2013 literasi dan karakter menjadi target kompetensi yang ingin dicapai namun kedua kompetensi ini tidak tersirat dengan jelas pada kompetensi dasar yang menjadi acuan guru dalam pembelajaran, sehingga dalam praktiknya ketika guru ingin mengupayakan pencapaian kompetensi literasi dan karakter, guru harus terlebih dahulu memetakan KD, mengidentifikasi KD yang terkait dengan literasi dan karakter, baru kemudian merencanakan pengintegrasian, hal ini tentunya menjadi beban tambahan bagi guru.

2. Penyesuaian Pembelajaran

Setiap peserta didik belajar dengan cara yang berbeda. Kondisi ini mengisyaratkan peserta didik termasuk guru dalam kedudukannya sebagai pembelajar sepanjang hayat memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Dari hasil kajian dapat kita pelajari bagaimana temuan di lapangan mengindikasikan pemenuhan kebutuhan setiap peserta didik dan guru belum terjadi. Kondisi ini terjadi berkaitan dengan penjelasan pada poin pertama, bahwa kendala yang menghambat keinginan dan upaya untuk

memenuhi kebutuhan belajar guru dan peserta didik merupakan dampak dari arsitektur satuan pendidikan yang interdependent. Standar yang ada teridentifikasi menjadi penghambat, terlebih ketika standar itu dijadikan kriteria untuk penilaian guru (sertifikasi) dan penilaian satuan pendidikan (akreditasi).

3. Penilaian

Melaksanakan berbagai format penilaian kepada peserta didik dapat mengatasi atau mengurangi tingkat stres peserta didik. Dari hasil kajian teridentifikasi, dampak dari pola penilaian yang dilaksanakan saat ini salah satunya adalah satuan pendidikan, peserta didik dan guru tanpa disadari sangat memfokuskan pembelajaran pada mata pelajaran yang di ujian nasional-kan atau di ujikan, bahkan beberapa guru mata pelajaran lain merasa mata pelajarannya tidak dianggap penting kemudian guru tersebut tidak mendapat dukungan untuk melaksanakan pembelajaran. Selain itu pola penilaian yang dilaksanakan saat ini juga masih terstandar, masih untuk menilai pengetahuan dan keterampilan, berbasis kertas dan pensil, atau berbasis komputer, tes tertulis, dan tes praktek. Tantangan masa depan selain pembelajaran juga harus mengarah pada upaya untuk pencapaian kompetensi 4C yang dibutuhkan seperti kemampuan berpikir kritis (*critical*), mampu menyelesaikan masalah (*creative*), berkolaborasi (*collaborative*), mampu berkomunikasi yang ditambah karakter (*communicative*), maka pola atau format penilaian kita juga harus dapat mengukur kompetensi ini. Care (2018) di dalam bukunya yang berjudul *assessment and teaching of 21st century skills* menyatakan bahwa pengenalan kurikulum abad ke-21 memerlukan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana kompetensi ini diterjemahkan ke dalam rincian tentang apa yang peserta didik perlu pelajari dan ketahui, bagaimana melakukannya, dan apa yang guru perlu ajarkan dan bagaimana cara menilainya. Mengingat tujuan utama dari penilaian

adalah sebagai justifikasi untuk meningkatkan hasil pendidikan, informasi yang diperoleh dari peserta didik sebagai hasil penilaian harus diselaraskan dengan tujuan penerapannya.

Dari penjelasan ini dan jika kita mempelajari lebih dalam buku yang ditulis Care (2018) beserta timnya, kita akan mempelajari bagaimana kompleksnya menilai kompetensi 4C abad ke-21, namun demikian upaya untuk membuat format penilaian yang mampu mengukur kemampuan ini harus dilakukan karena merupakan kebutuhan generasi dan kehidupan masa depan kita, dari sini kita dapat mengetahui apakah benar proses pembelajaran yang kita lakukan sudah mengarah ke pencapaian kompetensi-kompetensi tersebut.

Simpulan dan Rekomendasi

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan yang dapat dirumuskan dalam merdeka belajar, maka kurikulum merdeka belajar dapat bermakna:

1. Satuan pendidikan yang berdaya untuk mengembangkan inovasi dalam pengelolaan satuan pendidikan, khususnya dalam pembelajaran.
2. Guru berdaya untuk mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan dan peserta didik.
3. Peserta didik berdaya untuk belajar dengan caranya sendiri.
4. Orangtua berdaya untuk membantu dan mendampingi anak-anaknya dalam belajar.

Upaya untuk mendukung satuan pendidikan, peserta didik, guru dan orangtua berdaya meliputi 3 (tiga) poin pembahasan sebelumnya, ialah mengubah arsitektur pendidikan/satuan pendidikan menjadi desain modular, memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda dan menciptakan sistem penilaian berbasis kompetensi dan dilaksanakan dengan berbagai strategi sehingga mampu mengukur kompetensi yang dibutuhkan dan memberikan umpan balik bagi perbaikan pembelajaran, serta membuka

kesempatan untuk keterlibatan orangtua dalam keberhasilan pembelajaran.

Menurut saya pemikiran ini dapat kita jadikan salah satu rasional untuk menggambarkan keterkaitan antara berbagai seri kebijakan merdeka belajar. Tidak cukup mengintervensi dengan mengubah strategi asesmen nasional atau menyederhanakan desain kurikulum, pembelajaran dan assesmen, pemerintah juga perlu memiliki program khusus untuk mengintervensi satuan pendidikan secara menyeluruh untuk mendapatkan model perubahan tatanan arsitektur pendidikan/satuan pendidikan menjadi desain yang modular, agar kemudian dalam model arsitektur ini satuan pendidikan dapat melakukan inovasi untuk merencanakan program yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks wilayah satuan pendidikan, di lain sisi guru dan peserta didik memiliki ruang yang leluasa untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta komunitas yang selama ini berada di luar pemerintah dan satuan pendidikan dapat memiliki akses untuk berkontribusi. Karena sebagaimana makna merdeka belajar yang sebelumnya penulis tawarkan, yaitu berdaya, untuk memiliki dan mempertahankan keberdayaan ini bukan pekerjaan yang mudah, cepat atau instan atau pekerjaan satu pihak saja, namun perlu keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan.

Jika yang dianggap kendala dalam implementasi kurikulum 2013 adalah kebijakan, seperti yang selama ini banyak dikeluhkan ialah terlalu banyak standar yang harus diikuti dan atau pola penilaian yang sulit, akreditasi satuan pendidikan yang sangat berorientasi pada dokumen dan lain sebagainya. Ketika kebijakan telah disederhanakan, pemerintah kemudian menyediakan berbagai pilihan untuk mendukung atau membantu satuan pendidikan, guru, peserta didik, dan orangtua untuk melaksanakan pembelajaran termasuk penilaian, apakah satuan pendidikan, guru, peserta didik dan, orangtua siap dan mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk memanfaatkan dukungan tersebut? Menurut saya proses ini merupakan satu proses yang baik yang harus kita hadapi dan lalui bersama, karena mutlak diperlukan untuk generasi dan kehidupan kita di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Christensen, C. M., Horn, M. B., & Johnson, C. W. (2008). How Disruptive Innovation Will Change the Way We Learn. *Education Week*, 27(39), 25-36.
- Griffin, P., Wilson, M., & Care, E. (Eds.). (2018). *Assessment and Teaching of 21st Century Skills: Research and Applications*. Springer International Publishing.
- Puskur. (2019). *Laporan Evaluasi Kurikulum 2013*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Schunk, D. H. (2012). *Learning Theories an Educational Perspective*. Pearson Education, Inc.